PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 900/129/HK-KS/X/2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR : 900/015/HK-KS/II/2025 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (PBPP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Personil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) sebagaimana yang telah ditetapkan pada Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor: 900/015/HK-KS/II/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor: 900/115/HK KS/VIII/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor: 900/015/HK-KS/II/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 11);

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 54);
11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 532) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor 560);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 900/015/HK-KS/II/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 900/015/HK-KS/II/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2025.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Oktober 2025
a.n. WALI KOTA SAMARINDA

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH,

HERO MARDANUS SATYAWAN

Unduh **DOKUMEN ASLI** di https://ttev2.samarindakota.go.id dengan
#ID DOK : 1C984-2025-16-60-010

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR: 900/129/HK-KS/X/2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR: 900/015/HK-KS/II/2025 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (PBPP)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

NO	BAGIAN	SUB KEGIATAN	PPTK	PBPP
I.	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan 2. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan urusan selain Renstra PD dan Renja PD	ANGGRINI JULIANTY,S.Tr.I.P NIP 200207242024092001	DENY YORDAN MASSOLO, NIP 199003032025061003
		1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dab Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD		EKA SUPRATIANA, SE NIPTT 2015 0701 1616
		1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		DEWI SRI MINARNI,A.Md NIPTT 2012 0901 1020
		1. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 2. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Stastistik Sekrotal Daerah		RUSNIAWATI GUSTAF ANTON NIP 198112192010012009
NO	BAGIAN	SUB KEGIATAN	PPTK	PBPP
	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	HAMIMAH IDRIANTI, SE NIP 197802232009012001	HERMAN DIANTO NIPTT.2015.07.01.1791 HERMAN DIANTO NIPTT.2015.07.01.1791

		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan AS 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		GITA DEFIYANA MAYANGSARI,SE NIP 197712152007012014
I.	UMUM	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 6. Pengadaan Aset Tetap Lainnya 7. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	WAHYUDI SYUKUR, SE NIP. 198010132008011011	RAUDATTUL JANNAH, SE NIP. 198501162014082003
NO	BAGIAN	SUB KEGIATAN	PPTK	PBPP
	UMUM	1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	WAHYUDI SYUKUR, SE NIP. 198010132008011011	HASNI NIP. 199901022025062008
		1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2. Fasilitasi Kunjungan Tamu		RANNY ANGGRAENI NIPTTB. 2014.01.01.1292
		1. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		GABRIEL TANGKE NIP.198203202008011011

		1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 3. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		MAULIDA FITRIYANA NIPTTB. 2014.01.01.1440
		1. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 2. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.		HENDI HANDOYO
NO	BAGIAN	SUB KEGIATAN	PPTK	PBPP
	UMUM	1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 2. Penyediaan Barang Cetakan , penggandaan	WAHYUDI SYUKUR, SE NIP. 198010132008011011	FARADILLA SEVDHIANTY

NO	BAGIAN	SUB KEGIATAN	PPTK	PBPP
	UMUM	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2. Sosialisasi Peraturan Peundang-undangan 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	WAHYUDI SYUKUR, SE NIP. 198010132008011011	NUR MUTHMAINNAH
		1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan atau Bangunan Lainnya 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pengadaan Mebel		SETIYA DARMA
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Pengadaan Aset Tak Berwujud 3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	WAHYUDI SYUKUR, SE NIP. 198010132008011011	M.ANANDA LODY
III.	HUKUM	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Wendy Arya Wiwesa.P.SH NIP. 198907022015031003	RUSTINAWATI NIPTTB. 2010.08.01.0091
		2. Fasilitasi Bantuan Hukum	ELIA JESIKA MENING.SH.MH NIP. 199301132020122018	YULI KUSTIA NINGSIH, SH NIPTTB. 2014.01.01.1422
		3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	IKE NATALIA DAHLIANA, SH NIP. 197210242006042015	SELA VERA MARETI, SH NIPTTB. 2014.01.01.1297

NO	BAGIAN	SUB KEGIATAN	PPTK	PBPP
IV.	SUMBER DAYA ALAM	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kegiatan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Drs. ABDUL HAFIDZ NIP. 196810111988031002	SUSILORINI, SP NIP. 198008072009012003
		2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	JAINI, S.Sos. M.Si NIP. 197001151992121001	ERHAMIDI, A.Md NIPB. 2012.01.01.0616
		3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	JAINI, S.Sos. M.Si NIP. 197001151992121001	MARDIANA, S.IP NIPPTTB. 2012.01.01.0818
V.	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	AIDA SAMSYIANAH, SE NIP. 197609131997032004	DEWI RAHMAWATI, SH NIPTTB. 2015.07.01.1769
		2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	DIKY RUSANDRIANOER,SSTP.,M.Si NIP. 199011192012061001	EKA WARDANI, A.Md NIP. 198908082011012002
		3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		DEWI YANI NIPTTB. 2013.07.01.1211
VI.	PEREKONOMIAN	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMN dan BLUD	RUSLINAWATI, SH, M.Si NIP. 19700809 200112 2 004	NOR SHOLIHA, SHI NIPTTPB.2014.01.01.1363
		2. Koordinasi,Sinkronisasi dan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD		RONNY ADITYA NIPTTB.2015.07.01.1813
		3. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	TUGIYAHWATI, SE NIP 197505102010012007	YESI EMILIA, SE NIPTTB.2015.07.01.1717
		4. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	DARWIS NIP 197506062009011004	YOLLA ERGOMETRIANY HARTATY, SE NIPTTB. 2009.10.01.0026

NO	BAGIAN	SUB KEGIATAN	PPTK	PBPP
VII.	KERJASAMA	1. Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	ANDRIAWINATA, SP NIP. 197004161998031012	TOMOAKI, S.Sos NIPTTB. 2015.07.01.1589
		2. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	ANDRIA WINATA, S.P NIP. 197312312000032011	PUSPA HIMMA ANNISA, A.Md NIP. 199110152015032003

		3. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	EKA RISHNA,S.E NIP.198603262009012003	AJENG DIAH AYU PRAMUWATI, S.Tr.IP NIP.200006122023082003
VIII.	PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	JOKO PURWANTORO, SH NIP. 197511112010011002	TOMMY HERISTOMO CIPTO HATMOKO, SE NIPTTB 2011.01.01.0198
		2. Fasilitasi Keprotokolan	BAYU HIDAYAT,S.STP NIP. 199505162017081001	M.TAUFIQ FAZICHUDIN NIP. 19940612202511019
		3. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	FATWA, ST NIP. 198212192009011003	LIS INDARTI NIPTTB. 2015.0101.1639
IX.	TATA PEMERINTAHAN	1. Penataan Administrasi Pemerintahan	DATU MUHAMMAD PANJI BANGSAWAN, S.Tr.IP NIP. 199912162022081002	MUHAMMAD HENDARIN NOOR NIPB. 2010.12.01.0137
		2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	SYAMSUL FAJRI, SH NIP. 197712022002121002	LA JUMA NIPTTB. 2012.10.01.0638
		3. Fasilitasi Otonomi Daerah	AGUS SAID NIP. 197508152008011023	LA JUMA NIPTTB. 2012.10.01.0638
X.	PENGADAAN BARANG DAN JASA	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	RONAL NIP. 198308172007011004	HENDRA BUDI NIP. 197601052007011010
		1.		
		2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	MALIK,S.Pi NIP 197803022008011015	MOHAMMAD REZZA FAZRIANY, S.Hut NIP. 197802242008011011
		3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	WAHYONO, ST NIP. 198007082015031001	HAMDANI, SH NIP. 199511292022031006
NO	BAGIAN	SUB KEGIATAN	PPTK	PBPP
XI.	ORGANISASI	1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	HELLEN NESIA B, ST NIP. 198808012011012003	DEDE DAMAIYANTO, S.Sos, M.Si NIP. 198503312010011011
		2. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		HERLIANI NIP. 197907312012122001
		3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		MUHAMMAD RIZKY NUGRAHA, S.KOM NIP. 199304272015031001

		4. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		AGUNG BUDI HARKO NIPTTB 2012.01.01.0466
		5. Koordinasi dan Penyususnan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		M. RIZKY NUGRAHA,S.Kom NIP. 199304272015031001
XII.	KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	M.ILHAM, S.HI NIP 198007302011011002	MUHAMMAD HABIBI,S.H NIP. 198308262008011008
		2. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampikan untuk Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	SYAMSU NAJRI, S.E NIP. 198110102008011029	IKHA KARTIKA MAHARANI NIPTTB. 2012.01.01.0612
		3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.	SYAHVIANTI NIP 197206241992122001	M. SABILAL MUHTADIN NIPTTB. 212.01.01.0820
		4. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	HENI ARBAYANTI, S.Sos NIP. 197206102007012038	LINA HAYATI, M.A NIPTTB.2012.03.01.0860
		5. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama Antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	HENI ARBAYANTI, S.Sos NIP. 197206102007012038	CHOIRUL ANWAR SODIQ, S.H.I NIPTTB. 2012.03.01.0842

a.n. WALI KOTA SAMARINDA

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH,

HERO MARDANUS SATYAWAN

Unduh DOKUMEN ASLI di https://ttev2.samarindakota.go.id dengan
#ID DOK : 1C984-2025-16-60-010